

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Attamimi, A. Hamid S. 1990. *Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bima Ilmu.
- Hanafiah, Jusuf M. dan A. Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, C.ST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi III*. Yogyakarta: Rake Karasin.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (cetakan keempat)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddi, Aziz. 2011. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsudin, M. 2001. *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, 1993, *Penemuan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal

Evi Hasnita."Terapi Okupasi Perkembangan Motorik Halus Anak Autisme".
Jurnal Ipteks Terapan. Vol. 9 No (20-27).Juli 2015.

Internet

<http://kbbi.web.id/sinkronisasi>, diakses pada tanggal 7 Januari 2019.

<http://www.suduthukum.com/2016/11/sinkronisasi-hukum.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Okupasi.